



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN**

**MODUL
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
BAGI PENYULUH**

1	KELOMPOK JABATAN	Ahli
2	JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Alih Kelompok
3	KELOMPOK MATERI	Penunjang
4	JUDUL MATA DIKLAT	Pembiayaan Usaha Pertanian
5	DESKRIPSI MATA DIKLAT	Mata diklat ini mencakup tentang pembiayaan usaha dan penyusunan proposal usaha pertanian.
6	POKOK BAHASAN	1. Pembiayaan usaha pertanian 2. Penyusunan proposal usaha pertanian.
7	KOMPETENSI DASAR	Peserta dapat menjelaskan Pembiayaan usaha Penyusunan proposal usaha pertanian
8	INDIKATOR HASIL BELAJAR	Peserta dapat : a. Menjelaskan tentang pembiayaan usaha. b. Menjelaskan penyusunan proposal usaha pertanian.
9	WAKTU PEMBELAJARAN (T/P)	(2 x 45 menit) / (4 jam x 45 menit)
10	METODE PEMBELAJARAN	1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskus
11	ALAT DAN BAHAN	1. Infocus 2. Laptop 3. Spidol kecil dan besar 4. Kertas Koran 5. Lakban 6. Ketas HVS

LANGKAH KEGIATAN

No	URAIAN KEGIATAN	WAK TU (menit)
1.	Pengantaran: Peserta mendengarkan fasilitator memperkenalkan diri Peserta memperkenalkan nama dan asal daerah masing-masing	10
2.	Peserta mendengarkan fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan belajar yang ingin dicapai serta membangkitkan minat belajar.	10
3.	Peserta menyampaikan persepsi tentang : - Pembiayaan usaha - Penyusunan proposal usaha pertanian	30
4.	Peserta membagi diri ke dalam 4 kelompok atau disesuaikan dengan jumlah peserta.	15
5	Peserta melakukan diskusi : - Pembiayaan usaha pertanian - Penyusunan proposal usaha pertanian	90
6.	Presentasikan hasil diskusi kelompok (diskusi pleno). ❖ Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok ❖ Beri kesempatan bagi kelompok non penyaji untuk bertanya dan kelompok penyaji untuk menjawab. ❖ Setiap kelompok menyimpulkan hasil diskusi	85
7	Mendengarkan penjelasan dari fasilitator tentang pokok bahasan materi pelatihan.	20
8	Peserta mendengarkan fasilitator menyampaikan kesimpulan hasil proses belajar.	10

BAB I PENDAHULUAN

Pembiayaan Usaha Pertanian

Para pelaku agribisnis skala kecil dan menengah seringkali banyak mengalami hambatan dalam mengembangkan agribisnisnya. Permasalahan yang dihadapi dapat berasal dari jumlah permodalan yang ada, terbatasnya akses kepada sumber permodalan, terbatasnya pengetahuan akan jenis-jenis modal, serta kemampuan di dalam menentukan serta menyusun proposal usaha pertanian sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh permodalan usaha.

BAB II. PEMBIAYAAN USAHA PERTANIAN

A. Pengertian pembiayaan Usaha pertanian

Secara umum pembiayaan merupakan salah satu kegiatan dari manajemen keuangan dan disebut pula sebagai *Financing*. Pembiayaan merupakan kegiatan penentuan kebutuhan modal, jenis-jenis permodalan, sumber-sumber permodalan, dan menyalurkannya secara efektif dan efisien ke dalam kegiatan usaha yang telah direncanakan. Usaha pertanian disebut juga sebagai usaha agribisnis yaitu rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4(empat) sub sistem , yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain. Dengan demikian maka pembiayaan usaha pertanian adalah merupakan kegiatan penentuan kebutuhan modal, menentukan sumber-sumber permodalan, dan menyalurkannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan usaha pertanian.

Permodalan merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha pertanian. Dalam operasionalisasi usaha pertanian seringkali pelaku agribisnis mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya seperti tidak terpenuhinya jumlah modal yang dibutuhkan dan terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber permodalan.

Permodalan untuk mendukung kegiatan usaha pertanian dapat berasal dari dua sumber yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri diperoleh dari pemilik usaha pertanian yang diperoleh dari penjualan saham. sedangkan modal pinjaman diperoleh dari pihak luar dalam bentuk pinjaman atau kredit.

B. Perkreditan

Kredit berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti percaya. Inilah sebabnya sampai batas tertentu dasar kredit yang utama adalah kepercayaan dari semua pihak yang bersangkutan dengan perkreditan tersebut.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungannya.

Kepercayaan yang dimaksud pada perkreditan tersebut ada tiga hal :

- (1). Kepercayaan bahwa posisi materi dari si peminjam mampu mengembalikan modal yang dipinjam tersebut.
- (2). Kepercayaan bahwa si peminjam akan mengembalikan utangnya.
- (3). Kepercayaan bahwa hukum-hukum yang sah dapat melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi kredit apabila ada yang dirugikan karena ada persyaratan yang dilanggar.

1. Unsur-unsur kredit.

Disamping pengertian tersebut di atas dalam memahami kredit dikenal pula dengan unsur-unsur kredit. Unsur-unsur tersebut adalah :

- *Kepercayaan*, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditor kepada debitor, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitor akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak.
- *Waktu*, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
- *Penyerahan*, yang menyatakan bahwa pihak kreditor menyerahkan nilai ekonomi kepada debitor yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo.
- *Risiko*, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.
- *Prestasi*, yang menyatakan bahwa kredit mengandung prestasi berupa pembayaran bunga.
- *Persetujuan/perjanjian*, yang menyatakan bahwa antara kreditor dan debitor terdapat persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

2. Pengelompokkan kredit :

Berdasarkan pengelompokkannya kredit dibagi ke dalam beberapa kelompok, antara lain

a. Kredit berdasarkan hasil pemakaian (Galbraith, 1952) yaitu kredit

positif , kredit netral, dan kredit negatif (kredit tidak produktif).

- Kredit positif yaitu setelah jangka waktu peminjaman dan uang yang dipinjam sudah dipakai habis, petani akan mendapatkan hasil sebesar jumlah pinjaman ditambah dengan bunga, ongkos pinjaman lainnya, dan keuntungan untuk dirinya.

- Kredit netral yaitu kredit yang hasil pemakaiannya hanya menghasilkan jumlah

pinjaman ditambah dengan bunga dan ongkos pinjaman lainnya. Kredit ini disebut pula sebagai *maintenance credit*.

- Kredit negatif yaitu hasil yang diperoleh dari pemakaian pinjaman kurang dari jumlah yang diperlukan untuk membayar jumlah pinjaman, bunga, dan ongkos-ongkos pinjaman lainnya.

b. Kredit berdasarkan waktu yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- Kredit jangka pendek terdiri atas kredit bulanan yang berjangka waktu nol sampai tiga bulan ; Kredit musiman, jangka waktu antara tiga sampai dengan sembilan bulan; dan kredit tahunan yang berjangka waktu sembilan sampai 12 bulan.
- Kredit jangka menengah adalah kredit yang batas pelunasannya satu sampai dengan lima tahun.
- Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktu pelunasannya lebih dari lima tahun.

c, Kredit berdasarkan tujuan pemakaian, yaitu kredit produksi (biasanya kredit jangka pendek dan menengah) , kredit modal untuk barang tidak bergerak yang merupakan kredit jangka panjang, dan kredit koperasi pertanian.

- Kredit produksi , biasanya kredit jangka pendek atau jangka menengah dengan tujuan untuk :

(1). Membeli sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih atau bibit,dll.

(2). Membayar ongkos-ongkos operasional.

(3). Membeli alat dan mesin pertanian.

(4). Membiayai bangunan dan sarana penyimpanan produk.

- Kredit modal, ditujukan untuk pembelian barang tidak bergerak dan merupakan

kredit jangka panjang untuk pembiayaan :

(1). Membeli suatu perusahaan pertanian.

(2). Membeli tambahan tanah untuk perluasan usahatani.

(3). Membiayai pembuatan pabrik dan sarana bangunan lainnya.

(4). Memperbaiki perbaikan mutu tanah, seperti membuat saluran drainase dan irigasi.

- Kredit koperasi pertanian yaitu kredit yang dapat dipakai untuk :
 - (1). Membayar ongkos operasional.
 - (2). Membiayai sarana pendukung
 - (3). Membiayai sarana penyimpanan produk.
 - (4). Membiayai sarana bangunan dan alat-alat produksi.
 - (5). Membiayai keperluan lainnya.

3. Tujuan Pemberian Kredit

- Bagi bank:
 - a) *Profitability*, artinya ada keuntungan yang diperoleh secara wajar
 - b) *Safety*, artinya harus aman dengan risiko yang telah dimitigasi sebelumnya.
- Bagi nasabah: memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat luas, dan meningkatkan produktivitas usaha.
- Bagi masyarakat umum Kredit akan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan kesempatan kerja.

4. Prosedur Kredit

- Merencanakan Pasar Sasaran.

Bank harus mempunyai perencanaan yang baik seperti pasar mana yang akan dituju dalam memasarkan kreditnya, misalnya memfokuskan pada pemeberian kredit untuk sektor ril, sektor pertanian, sektor industri, dll.

- Menentukan kriteria risiko yang dapat diterima bank.

Bank hanya memasarkan kredit apabila kriteria risikonya jelas dan dapat dimitigasi, misalkan dengan: menetapkan *limit exposure*, jenis usaha (dibuat ratingnya, dan rating apa saja yang layak dibiayai), lokasi dsb nya.

- Menentukan kriteria nasabah kredit yang diberikan, berdasar pada kriteria nasabah yang jelas.

5. Putusan Kredit

Setiap pemberian kredit agar dapat diterima bank (*bankable*) harus melalui mekanisme proses dan prosedur baku, antara lain:

- Ada permohonan kredit secara tertulis
- Dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan
- Disertai dengan proposal kredit
- Dibuat rekomendasi dan putusan kredit
- Dibuat pemberitahuan putusan kredit secara tertulis
- Melakukan perjanjian kredit secara hukum
- Proses pencairan kredit
- Melakukan pengawasan dan evaluasi

6. Peranan Kredit Pertanian

Pengalaman menunjukkan peran kredit pertanian sangat mendukung dalam pembangunan sektor pertanian. Menurut Syukur *et.al.*, 1998, Kredit merupakan salah satu faktor pendukung utama pengembangan adopsi teknologi usahatani. Kredit pertanian bukan sekedar faktor pelancar pembangunan pertanian akan tetapi berfungsi pula sebagai satu titik kritis pembangunan pertanian.

Peranan kredit sebagai pelancar pembangunan pertanian antara lain :

- a. membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga relatif ringan,
- b. mengurangi ketergantungan petani pada pedagang perantara dan pelepas uang, sehingga bisa berperan dalam memperbaiki struktur dan pola pemasaran hasil pertanian.
- c. mekanisme transfer pendapatan untuk mendorong pemerataan, dan
- d. insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian.

Dalam tatanan konseptual, menurut Tampubolon (2002), kredit dianggap mampu memutuskan lingkaran setan kemiskinan di perdesaan . Dengan pasokan kredit diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam membeli saprodi sehingga produktivitas panen meningkat. Mengingat urgensi kredit ini, maka dalam proses perencanaan program pembangunan pertanian, aspek permodalan merupakan salah satu faktor penting yang selalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Oleh karena itu pemberian kredit program biasanya sejalan atau dijadikan sebagai unsur pelancar bagi program pembangunan pertanian lainnya.

Menurut Hermanto (1992), dalam pelaksanaan kebijakan kredit program sebenarnya pemerintah telah memberikan subsidi pada beberapa hal, diantaranya :

- a. subsidi terhadap tingkat suku bunga
- b. subsidi terhadap biaya risiko kegagalan kredit
- c. subsidi kepada biaya administrasi dalam penyaluran, pelayanan, dan penarikan kredit.

Sistem pembiayaan Kredit Program

Menurut Soenanto *et al*, (1992), perkembangan kredit program pemerintah untuk sektor pertanian tidak dapat dipisahkan dengan program intensifikasi pertanian dan program peningkatan ekonomi perdesaan. Agenda utama dari program tersebut adalah untuk mencapai swasembada beras nasional. Dari upaya tersebut lahirlah program Bimas yang keberhasilannya sangat ditunjang oleh keberadaan program kredit pertanian.

Kebijakan Kredit Program Pemerintah

Penyusunan sebuah opsi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi saat kebijakan tersebut dibuat serta memperhatikan besaran biaya yang harus ditanggung untuk mendukung efektivitas kinerja kebijakan tersebut. Dengan demikian seiring dengan dinamika kondisi masyarakat sebagai kebijakan serta ketersediaan anggaran pemerintah, maka sudah sewajarnya jika dilakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaan. Demikian juga dalam hubungannya dengan kebijakan terkait kredit program dan bantuan modal untuk petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.

Keunggulan dan Kelemahan Sistem Kredit Program

Program pemerintah dalam membantu pembiayaan di sektor pertanian secara umum diwujudkan dalam dua bentuk yaitu :

- a. Bantuan langsung (*grant*) dan bersifat bergulir. Pada bentuk ini tidak ada kewajiban secara tegas untuk mengembalikan baik pokok maupun bunga. Contoh bantuan langsung ini adalah untuk program PUAP.
- b. Kredit komersial dengan bantuan subsidi bunga oleh pemerintah.

Keunggulan bantuan langsung (grant) adalah : petani benar-benar dibantu modal secara penuh tanpa ada beban risiko untuk mengembalikan hutang sehingga mereka lebih tenang dalam berusahatani.

Kelemahan bantuan langsung (grant) adalah :

- a. kurang mendidik petani untuk lebih bertanggungjawab dan berperilaku profesional dalam penggunaan dana masyarakat.
- b. peluang terjadinya moral hazard sangat besar.

- c. kontinuitas pelaksanaan sangat tergantung dengan keberadaan suatu proyek sehingga ketika proyek berakhir program pun juga terhenti.
- d. *reward* dan *punishment* sangat lemah, dan
- e. sangat membebani anggaran pemerintah dengan output yang tidak terukur secara jelas.

Keunggulan Kredit komersial bersubsidi (seperti KKP) yaitu :

- a. bunga relatif rendah dan terjangkau,
- b. bentuk pinjaman yang sebagian diwujudkan dalam bentuk natura cukup membantu petani sehingga tidak merepotkan petani untuk membeli saprodi di kios/toko saprotan,
- c. pengusulan secara berkelompok untuk mendapatkan kredit juga lebih efisien dan murah, disamping merangsang anggota kelompok untuk bekerja lebih solid,
- d. walaupun belum secara maksimal, dalam taraf tertentu dapat mendidik masyarakat untuk lebih bertanggungjawab dan profesional dalam pengelolaan dana masyarakat, serta
- e. petani/kelompok petani dapat mengenal prosedur dan mekanisme sistem perbankan sehingga diharapkan seandainya program berakhir mereka sudah terbiasa berurusan dengan perbankan dan dapat secara mandiri mengajukan pembiayaan usahanya.

Kelemahan dari jenis kredit program bersubsidi adalah :

- a. masih relatif sulit diakses oleh petani karena syarat pengajuan yang cukup ketat,
- b. waktu yang dibutuhkan dari mulai pengajuan kredit hingga realisasi dinilai masih relatif lama,
- c. persyaratan agunan yang mengharuskan tanah bersertifikat, serta dalam kasus tertentu keharusan berkelompok dengan luasan areal minimal yang.

Jenis-jenis kredit

Kredit dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu

- 1). Kredit program pemerintah.

Kredit program adalah kredit yang diperoleh dari pemerintah untuk mendukung kegiatan masyarakat seperti Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Kredit ini bunganya umumnya disubsidi.

2). Kredit dari lembaga formal,

Kredit ini diperoleh dari lembaga keuangan perbankan (BRI,BPR,dll) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti perusahaan sewa guna (*leasing*), Perusahaan modal ventura, dll.

3). Kredit dari lembaga informal, seperti kredit yang diperoleh dari pedagang, pelepas uang, kelompok tani, dan sebagainya.

7. Sumber-sumber pembiayaan :

Sumber pembiayaan pertanian dapat diperoleh antara lain dari Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Modal Ventura, sistem tunda jual (gabah, komoditas peternakan dan perkebunan), pembiayaan sistem syariah untuk agribisnis, pemanfaatan laba BUMN, Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) pada sektor pertanian untuk membiayai usaha budidaya yang belum dibiayai KKP seperti pengadaan sarana dan hasil produksi dan pengadaan alat dan mesin pertanian.

Berikut ini diuraikan mengenai Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Modal Ventura

a. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

KKP-E adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.

KKP-E adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi. Pola penyalurannya *executing*, sumber dana 100% dari perbankan dan risiko ditanggung oleh perbankan.

1). Tujuan

(a). meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung program pengembangan tanaman untuk bahan bakar nabati ,

(b). membantu petani atau peternak dibidang permodalan agar dapat menerapkan teknologi rekomendasi sehingga produktivitas dan pendapatan petani menjadi lebih baik.

2). Sasaran

(a).Petani, dalam rangka pengembangan tanaman pangan: padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, koro, perbenihan (padi, jagung dan/atau kedelai);

- (b). Petani dalam rangka pengembangan hortikultura: bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, jahe, kunyit, kencur, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk dan/atau apel;
- (c). Petani, dalam rangka pengembangan perkebunan : budidaya tebu.
- (d). Peternak, dalam rangka pengembangan peternakan : sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, dan/kelinci;
- (e). Koperasi dalam rangka Pengadaan pangan : gabah, jagung dan/atau kedelai.
- (f). Kelompok tani dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tersebut di atas meliputi traktor, power thresher, corn sheller, pompa air, dryer, vacuum fryer, chopper, mesin tetes, pendingin susu, dan/atau biodigester.

3). Suku Bunga

Suku bunga yang dibayar petani peserta KKP-E adalah sebesar suku bunga komersial dikurangi subsidi yang dibayar oleh pemerintah. Suku bunga bersubsidi yang dibayar oleh petani Tebu sebesar 7% per tahun dan untuk petani Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Pengadaan Pangan, dan kelompok tani alsintan sebesar 6% per tahun. Ketentuan ini berlaku mulai 1 April 2009 s/d 30 September 2009.

4). Jangka Waktu

Jangka waktu kredit disesuaikan dengan siklus usaha, paling lama 5 tahun.

5). Besaran Kredit

Kebutuhan indikatif untuk tiap komoditas sebagai berikut : padi sawah irigasi : Rp 5,032 juta/Ha, padi tadah hujan/gogo rancah : Rp 5,032 juta/Ha, padi hibrida : Rp 6,590/Ha, padi pasang surut : Rp 3,357/Ha, jagung hibrida : Rp 5,845 juta/Ha, kedelai : Rp 4,754 juta/Ha, ubi kayu : Rp 4,685 juta/Ha, ubi jalar : Rp 8,761 juta/Ha, kacang tanah : Rp 5,661 juta/Ha, koro : Rp 5,830 juta/Ha, perbenihan padi : Rp 7,145 juta/Ha, perbenihan jagung : Rp 6,675 juta/Ha, perbenihan kedelai : Rp 5,453 juta/Ha, cabai : Rp 49,290 juta/Ha, bawang merah : 46,195 juta/Ha, kentang : Rp 46,356 juta/Ha, Jahe : Rp 29,500 juta/Ha, kencur : Rp 27,500 juta/Ha, kunyit : Rp 23,500 juta/Ha,

pisang : 18 juta/Ha, nenas : Rp 38 juta/Ha, buah naga : Rp 41,029 juta/Ha, melon : Rp 35,769 juta/Ha, semangka : Rp 24,548 juta/Ha, pepaya : Rp 19 juta/Ha, salak : Rp 48,961 juta/Ha, stroberi : Rp 49,147 juta/Ha, durian : Rp 20,239 juta/Ha, mangga : Rp 20,504 juta/Ha, manggis :Rp 20,831 juta/Ha, jeruk : Rp 49,527 juta/Ha, apel : Rp 48,092 juta/Ha, tebu Rp 18 juta/Ha, ayam buras : Rp 50 juta/peternak, ayam ras petelur : Rp 50 juta/peternak, ayam ras pedaging : Rp 50 juta/peternak, burung puyuh: Rp 50 juta/peternak, sapi potong/perah dara/pedet : Rp 50 juta/peternak, penggemukan sapi: Rp 50 juta/peternak, pembibitan sapi: Rp 50 juta/peternak, kambing : Rp 50 juta/peternak, kerbau : Rp 50 juta/peternak.

6). Persyaratan dan Kewajiban

- (a) .Petani mempunyai identitas diri.
- (b). Petani menjadi anggota kelompok Tani.
- (c).Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap).
- (d).Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (e). Luas lahan petani yang dibiayai maksimum 4 (empat) Ha dan tidak melebihi plafon kredit Rp 50 juta per petani.
- (f). Petani peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
- (g). Bersedia mengikuti petunjuk dinas teknis atau penyuluh pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.

7). Prosedur Penyaluran

Penyaluran KKP-E dapat dilakukan secara mandiri melalui kelompok tani/koperasi atau bekerjasama dengan mitra usaha.

- (a). Prosedur Penyaluran KKP-E Melalui Kelompok Tani/Koperasi :
 - (1). Kelompok Tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di bantu oleh Petugas Dinas Teknis setempat/PPL.
 - (2). Dinas Teknis/PPL terkait mensahkan RDKK.
 - (3). RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank Pelaksana.
 - (4). Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RDKK, dan apabila dinilai layak kemudian bank menandatangani akad kredit dengan Kelompok tani, selanjutnya menyalurkan KKP-E kepada Kelompok

Tani.

- (5). Kelompok Tani meneruskan KKP-E kepada petani anggota kelompok.
- (6). Petani mengembalikan kredit kepada kelompok tani.
- (7). Kelompok tani mengembalikan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit.

(b). Prosedur Penyaluran KKP-E Bekerjasama dengan Mitra Usaha :

(1) Kelompok Tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dibantu oleh Petugas Dinas Teknis setempat/PPL.

(2).Dinas Teknis/PPL terkait mensahkan RDKK.

RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank Pelaksana.

(3). Bank Pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RDKK, dan apabila dinilai layak kemudian bank menandatangani akad kredit dengan kelompok tani, selanjutnya menyalurkan KKP-E kepada Kelompok Tani.

(4). Dalam hal Kelompok Tani/koperasi bekerjasama dengan Mitra Usaha (Perusahaan BUMN, BUMD, Swasta lain yang memiliki usaha bidang pertanian, maka mitra usaha dapat bertindak sebagai penjamin pasar atau kredit (avalis) sesuai perjanjian pihak yang bermitra. Mitra Usaha bisa menyediakan kreditnya yang berkoordinasi dengan Bank Pelaksana.

(5). Kelompok tani mengembalikan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit.

8). Bank Pelaksana

Bank Pelaksana terdiri atas bank umum dan bank daerah :

Bank Umum

1. PT. Bank BRI (Persero), Tbk
2. PT. Bank BNI (Persero), Tbk
3. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
4. PT. Bank Bukopin, Tbk
5. PT. Bank BCA, Tbk
6. PT. Bank Danamon, Tbk
7. PT. Bank Agroniaga, Tbk

8. PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
 9. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
 10. PT. Bank Artha Graha, Tbk
- Bank Pembangunan Daerah
1. Bank Sumatera Utara
 2. Bank Sumatera Barat
 3. Bank Riau
 4. Bank Sumatera Selatan
 5. Bank Jawa Barat
 6. Bank Jawa Tengah
 7. Bank DI Yogyakarta
 8. Bank Jawa Timur
 9. Bank Bali
 10. Bank Sulawesi Selatan
 11. Bank Kalimantan Selatan
 12. Bank Papua

Peran Dinas Teknis/Stakeholder

1. Melakukan upaya intermediasi akses permodalan ke Lembaga Perbankan.
2. Membantu melakukan identifikasi petani yang layak dibiayai KKP-E.
3. Membantu mencari penjamin pasar atau penjamin kredit (avalis).
4. Melakukan bimbingan dan pengawasan agar kredit dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

b. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diberikan oleh perbankan kepada debitur baru yang *layak* tetapi belum *bankabel*.

Usaha layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/kewajiban pokok kredit/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati bank dengan debitur dan memberikan sisa keuntungan untuk

mengembangkan usahanya.

Belum bankable adalah calon debitur yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan / pembiayaan dari bank pemberi kredit antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan bank.

Tujuan dari KUR adalah :

- 1). meningkatkan akses kredit/pembiayaan petani, kelompok tani dan gabungankelompok tani kepada lembaga keuangan perbankan,
- 2). mempercepat pertumbuhan sektor riil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan),
- 3). Mendukung program ketahanan pangan dan program-program lain yang ada di departemen pertanian,
- 4). Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian.

Sasaran KUR adalah

- 1). Hulu :
 - a. Pengadaan sarana produksi
 - b. Pengadaan alisntan pra panen
- 2). On-farm
 - a. Budidaya Tanaman pangan
 - b. Budidaya Hortukultura
 - c. Budidaya Perkebunan
 - d. Budidaya Peternakan
- 3). Hilir :
 - a. Pengadaan hasil produksi
 - b. Pengadaan alisntan pasca panen
 - c. Pengolahan hasil dan pemasaran

Persyaratan :

1. Individu (Petani/Peternak) : usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, mengerjakan lahan sendiri atau menggarap atau menyewa lahan orang lain serta mempunyai KTP dan Kartu Keluarga.
2. Kelompok Tani, Gapoktan atau Asosiasi Petani yang disahkan oleh

Dinas Teknis setempat.

3. Koperasi yang dilengkapi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
4. Badan hukum lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh perbankan.

Prosedur Mengakses KUR

1. Petani/peternak, Kelompok tani, Gapoktan, Asosiasi petani, dan Koperasi yang membutuhkan kredit dapat menghubungi Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.
2. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana.
3. Mengajukan surat permohonan kredit /pembiayaan.
4. Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan usaha debitur.
5. Keputusan kredit/pembiayaan ada di Bank Pelaksana.

Bank Pelaksana KUR

1. PT Bank BRI(Persero), Tbk
2. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
3. PT Bank BNI(Persero), Tbk
4. PT Bank Bukopin, Tbk
5. PT Bank BTN(Persero).
6. PT Bank Syariah Mandiri.

Perusahaan Penjamin

1. PT.(Persero) Asuransi Kredit Indonesia(PT Askrindo)
2. Perum Sarana Pengembangan Usaha

Peranan Pemerintah(Pusat dan Daerah)

1. Melakukan upaya intermediasi akses permodalan ke Lembaga Perbankan.
2. Membantu melakukan identifikasi petani yang layak tetapi belum bankable untuk dibiayai KUR.
3. Membantu mencatatkan penjamin pasar (*off taker*).
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan agar kredit / pembiayaan dimanfaatkan secara optimal.

3. Modal Ventura

Modal ini diperoleh dari perusahaan modal ventura yaitu suatu badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang pemberian pinjaman modal ventura dengan tujuan menyertakan modal kepada perusahaan kecil maupun menengah untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan kemampuan berusaha para pengusaha tanpa menyimpang dari pelaksanaan kaidah bisnis yang sehat. Perusahaan modal ventura bukanlah sejenis yayasan yang ingin beramal, tetapi yang ingin menanamkan modalnya dengan mengharapkan keuntungan yang tinggi.

a. PMV memberikan penyertaan modal karena :

- 1). Ingin memperoleh keuntungan dengan cara bagi hasil melalui kerjasama kemitraan dengan PPU.
- 2). PPU memiliki potensi untuk dikembangkan dan prospek usahanya menguntungkan bila bekerjasama dengan PMV.
- 3). Melalui jalinan kemitraan antara PMV dan PPU, maka PMV akan mendorong perusahaan kecil sampai menengah untuk mampu mandiri dan lebih mengembangkan perusahaannya.

4. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh Modal Ventura

Pada dasarnya PMV dapat membiayai semua jenis usaha yang memiliki prospek dan potensi untuk berkembang. Usaha agribisnis yang dapat dibiayai dengan PMV adalah usaha tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Usaha tersebut meliputi kegiatan budidaya, pengolahan, pemasaran dan kegiatan jasa lainnya yang berhubungan dengan agribisnis.

Bantuan modal ventura adalah PMV diberikan kepada PPU yang usahanya baru dimulai maupun pada tahap pengembangan usaha, baik modal investasi untuk pembelian peralatan dan mesin, maupun modal kerja seperti pupuk, benih, bahan baku dan lain-lain.

b. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang berlaku untuk usaha dalam bentuk perorangan adalah sistem bagi hasil atau partisipasi terbatas. Jenis pembiayaan ini adalah suatu sistem pembiayaan oleh PMV dengan terlebih dahulu menentukan suatu persentase tertentu dari keuntungan bersih setiap bulan atau periode tertentu, yang diperoleh PPU untuk diberikan kepada PMV. Bersarnya prosentase tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PMV dan PPU.

c. Keuntungan yang diperoleh PMV

1. Keuntungan berupa uang yang diperoleh dari bagi hasil dengan PPU.
2. Aliran dana atau jasa yang diperoleh dari bagi hasil dengan PPU dapat menjaga kelangsungan hidup PMV guna terus berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi bangsa.
3. Sebagai bagian dari komunitas perusahaan nasional ikut andil mendorong tumbuhnya wiraswasta nasional yang tangguh dan berperan serta menyongsong era globalisasi.

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau kelompok/koperasi atau badan hukum penerima modal ventura.

a. Manfaat modal ventura bagi PPU

1. Ketersediaan modal yang murah untuk jangka pendek, tanpa harus menyediakan agunan dan membayar cicilan pinjaman bulanan seperti halnya pinjaman dari bank komersial.
2. PPU dapat memperoleh bantuan manajemen dari PMV yang mempunyai latar belakang bisnis yang kuat, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan bisnis.
3. PPU dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan.

b. Jenis Usaha yang dapat memperoleh modal ventura

Usaha agribisnis perorangan, kelompok tani atau perusahaan berbadan hukum yang dinilai layak oleh PMV, yaitu yang mempunyai peluang keberhasilan yang besar, mempunyai resiko rendah, dan mempunyai prospek untuk dikembangkan dalam tempo yang cukup singkat.

Aspek penting dalam pemanfaatan modal ventura

Upaya yang perlu dilakukan calon PPU untuk memperoleh modal ventura

1. Mempelajari persyaratan-persyaratan yang diminta oleh PMV.
2. Menyusun proposal (usulan) usaha Format proposal usaha dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.
3. Mengisi daftar isian yang disediakan oleh PMV.
4. Menyampaikan semua dokumen yang diperlukan kepada PMV untuk mendapatkan penilaian.
5. Kesungguhan kelompok tani/ perusahaan untuk mengembangkan

usaha.

Jenis usaha yang dibiayai oleh modal ventura adalah pengembangan usaha agribisnis yang memerlukan :

1. Modal kerja seperti pupuk, benih, bibit tanaman obat-obatan dan lain-lain.
2. Modal investasi seperti peralatan dan lain-lain.

Bentuk keikutsertaan perusahaan modal ventura (PMV) dalam perusahaan berbadan hukum (PT)

1. Pembiayaan modal ventura untuk perusahaan berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dapat berupa : Penyertaan saham langsung dalam bentuk saham di PPU. Syarat dari pembiayaan ini adalah PPU sudah merupakan perseroan terbatas bersamaan dengan masuknya PMV sebagai pemodal kedalam PPU. Hasil yang diterima oleh PMV berupa deviden yang akan dibagikan setiap tahun dari keuntungan bersih PPU. Keuntungan yang akan dibagi itu akan ditentukan bersama antara PMV dan PPU. Bersarnya pembagian hasil didasarkan atas perbandingan persentase penyertaan modal antara PPU dan PMV.
2. PPU Agribisnis yang dibiayai adalah pengusaha yang bergerak dibidang agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan bidang jasa yang berkaitan dengan usaha agribisnis.

Aspek-aspek bisnis yang harus dimiliki calon PPU

1. Manajemen perusahaan yang baik

Manajemen adalah unsur penentu utama atas keberhasilan atau kegagalan suatu usaha, karena itu kemampuan manajemen untuk mengolah bisnis yang tinggi dari perusahaan mendapat perhatian seksama.

2. Pangsa pasar perusahaan yang mapan

Perusahaan yang telah mempunyai pangsa pasar yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan teknologi yang cepat akan mempunyai keragaan penjualan/penerimaan yang mapan. Dalam upaya mengurangi resiko investasi PMV akan lebih tertarik pada perusahaan seperti ini.

3. Arus kas (*cash flow*) yang baik

Perusahaan yang memiliki arus kas dari pendapatan yang meningkat

dengan stabil, yang dapat memenuhi kewajibannya serta menunjang pertumbuhan selama periode investasi untuk memperoleh pendanaan.

Besar penyertaan modal ventura (PMV) kepada PPU agribisnis

1. Pada saat ini jumlah penyertaan modal ventura yang dapat disediakan oleh PMV daerah maksimal Rp 100.000.000,-.
2. Untuk penyertaan modal ventura diatas Rp 100.000.000,- PMV daerah akan mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Artha Ventura Jakarta.
3. Modal ventura yang didanai oleh PT. Bahana Artha Ventura minimal Rp 100.000.000,-.
4. Kebutuhan dana tersebut diperuntukkan minimum 50% untuk investasi dan sisanya untuk modal kerja apabila kebutuhan investasi kurang dari 50% maka asset capat di refinancing.

Waktu penyertaan modal ventura kepada PPU

1. Jangka waktu kerja sama
Jangka waktu kerja sama antara perusahaan modal ventura dengan PPU Agribisnis biasanya antara 3-6 tahun.
2. Pola Pembiayaan
Pola pembiayaan yang berlaku bagi PPU berbentuk Perseroan Terbatas adalah penyertaan saham langsung. Dalam pola ini PMV akan menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan saham.

Peran Pusat Pembiayaan Pertanian (dulu Ditjen Bina Sarana Pertanian) dalam membantu calon PPU memperoleh Modal Ventura

1. Ditjen Bina Sarana Pertanian telah memperbarui kesepakatan bersama dengan PT. Bahana Artha Ventura yang sebelumnya Departemen Pertanian diwakili oleh Badan Agribisnis untuk membantu kelompok tani dan perusahaan agribisnis skala kecil dan menengah untuk memperoleh modal ventura melalui kegiatan apresiasi temu usaha modal ventura.
2. Ditjen Bina Sarana Pertanian memfasilitasi penyampaian kelayakan usaha calon PPU.
3. Ditjen Bina Sarana Pertanian bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas terkait melakukan pembinaan teknis. Gambar tata cara memperoleh modal ventura terlihat pada Lampiran 1.

Prosedur Pemanfaatan Modal Ventura

Usaha Perorangan/Kelompok

Untuk memperoleh modal ventura, calon PPU dapat menyampaikan langsung permohonannya kepada PMV. Permohonan yang disampaikan kepada PT. Bahana Artha Ventura melalui Pusat Pembiayaan Pertanian (dulu Ditjen Bina Sarana Pertanian).

Tata cara untuk mendapatkan bantuan penyertaan modal ventura bagi PPU Perorangan /kelompok adalah sbb :

1. Penyampaian Usulan Usaha (Proposal)

Calon PPU menyampaikan proposal usaha kepada PMV.

2. Pusat Pembiayaan Pertanian(dulu Ditjen Bina Sarana Pertanian) akan melakukan evaluasi proposal dari aspek teknis dan merekomendasikan kepada PT. Bahana Artha Ventura.

3. Seleksi

PMV akan melakukan seleksi atas usulan rencana usaha yang disampaikan oleh PPU.

4. Evaluasi

Rencana usaha yang mempunyai prospek baik akan dievaluasi lebih mendalam. Evaluasi meliputi kelayakan usaha pasar, karakter pengusaha, kondisi lapangan (tempat usaha) dll,

5. Musyawarah (Negosiasi)

Musyawarah antara PMV dan PPU meliputi hal-hal jangka waktu kerjasama, jumlah penyertaan modal, pembinaan manajemen, pemantauan, sistem bagi hasil, asuransi, pelaporan, pajak dll.

6. Perjanjian

Perjanjian dibuat berdasarkan hasil musyawarah (negosiasi) , yang telah disepakati seperti pada butir 5.

7. Realisasi/Pencarian

Pada tahap ini PMV akan mencairkan modal ventura yang telah disepakati dalam bentuk uang tunai.

8. Pengembalian (divestasi)

Penarikan kembali modal ventura(divestasi) oleh PMV dari PPU dapat dilakukan dengan cara mengangsurkan setiap bulan atau persiklus selama jangka waktu kerjasama atau melunasi sekaligus pada saat kerjasama berakhir.

3. Analisis Kredit

Secara umum pihak perbankan dalam pemberian kreditnya kepada penerima kredit

menerapkan analisis yang terdiri atas analisis analisis 5 C dan 7 P.

a. Analisis 5 C terdiri atas :

- 1). Character yaitu menilai sifat, atau watak dari calon debitur
- 2). Capacity yaitu kemampuan calon debitur
- 3). Capital yaitu permodalan
- 4). Collateral yaitu nilai jaminan baik fisik / non fisik
- 5). Condition yaitu kondisi perekonomian

b. Analisis 7 P terdiri atas :

1. Personality yaitu sifat (kepribadian) dari calon debitur
2. Party yaitu modal, loyalitas dan karakternya
3. Purpose yaitu tujuan mengambil kredit
4. Prospect yaitu melihat usaha di masa datang
5. Payment yaitu pengembalian kredit
6. Profitability yaitu kemampuan mencari keuntungan
7. Protection yaitu jaminan perlindungan.

4. Metode perhitungan bunga kredit meliputi :

Dalam menentukan besarnya bunga terdapat beberapa metode perhitungan, antara lain metode :

- a. *Flat Rate* yaitu pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya disebut pula sebagai bunga tetap.
- b. *Sliding Rate* yaitu pembebanan bunga setiap bulan akan disesuaikan dengan sisa pinjamannya disebut pula sebagai bunga menurun.
- c. *Floating Rate* yaitu menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang.
- d. Metode anuitas (*annuity*) dengan terlebih dahulu menghitung *Capital of Recovery Factor* (CRF). Metode ini sepintas seperti modifikasi dari metode *flat rate* dengan *sliding rate*. Dengan menggunakan metode ini cicilan pokok meningkat dan cicilan bunga menurun.

Contoh perhitungan bunga :

Apabila jumlah pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- dengan tingkat bunga 20 %, dan periode pelunasan pinjaman 5 tahun, maka jadwal pengembalian pinjamannya dan besarnya bunga adalah sbb :

1. Metode Flate rate

Tabel 1. Contoh Perhitungan Flate rate (dalam ribuan)

Th ke	Saldo Awal (Rp)	Cicilan (Rp) *)			Saldo Akhir (Rp.)
		Pokok	Bunga	Total	
1.	30.000	6.000	6.000	12.000	24.000
2.	24.000	6.000	6.000	12.000	18.000
3.	18.000	6.000	6.000	12.000	12.000
4.	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000
5..	6.000	6.000	6.000	12.000	0
Jumlah (Rp)		30.000	30.000	60.000	-

*) Cicilan pokok/tahun = Rp 30.000.000 : 5 tahun = Rp 6.000.000,-

Cicilan bunga/tahun = 20 % x Rp 30.000.000,- = Rp 6.000.000,- (berlaku untuk selama 5 tahun.

2. Metode Sliding rate

Tabel 2. Contoh Perhitungan Sliding rate (dalam ribuan)

Th ke	Saldo Awal (Rp)	Cicilan (Rp) *)			Saldo Akhir (Rp.)
		Pokok	Bunga	Total	
1.	30.000	6.000	6.000	12.000	24.000
2.	24.000	6.000	4.800	10.800	18.000
3.	18.000	6.000	3.600	9.600	12.000
4.	12.000	6.000	2.400	8.400	6.000
5..	6.000	6.000	1.200	7.200	0
Jumlah (Rp)		30.000	18.000	48.000	-

*) Cicilan pokok/tahun = Rp 30.000.000 : 5 tahun = Rp 6.000.000,-

Cicilan bunga/tahun 1 = 20 % x Rp 30.000.000,- = Rp 6.000.000,-

2 = 20 % x Rp 24.000.000,- = Rp 4.800.000,- dst.

3. Metode Anuitas dengan Capital Recovery Factor (CRF)

Tabel 3. Contoh Perhitungan Anuitas dengan Capital Recovery Factor (dalam ribuan)

Uraian	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Total (Rp)
1. Pinjaman	30.000,00	25.967,74	21.130,03	15.324,07	8.356,63	0
2. Cicilan Pokok (4-3)	4.032,26	4.837,71	5.806,25	6.967,44	8.356,63	30.000,00
3. Cicilan Bunga (%Bx1)	6.000,00	5.193,55	4.226,00	3.064,81	1.671,33	20.155,69
4. Anuitas	10.032,26	10.032,26	10.032,26	10.032,26	10.032,26	50.161,29
5. Sisa Pinjaman (1-2)	25.967,74	21.130,03	15.324,07	8.356,63	0	

*) Cara perhitungan :

- 1, Menghitung anuitas untuk selama 5 tahun dengan rumus terlampir.
2. Menghitung Cicilan bunga pertahun = 20 % x Rp 30.000.000 = Rp 6.000.000,-
3. Menghitung Cicilan pokok pertahun = 10.032,260 -6.000.000 = 4.032.260,-
4. Menghitung sisa pinjaman pertahun = 30.000.000,- - 4.032.260,-=25.967.740,-

$$\begin{aligned}
 A = CRP = A = P \times & \frac{i (1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \\
 & = 30.000 \times \frac{0,2 (1+0,2)^5}{(1+0,2)^5 - 1} = 10.032,258 \\
 & = \mathbf{10.032,56} \text{ (Pembulatan)}
 \end{aligned}$$

RANGKUMAN

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan dari manajemen keuangan dan disebut pula sebagai *Financing*. Pembiayaan merupakan kegiatan penentuan kebutuhan modal, jenis-jenis permodalan, sumber-sumber permodalan, dan menyalurkannya secara efektif dan efisien. Usaha pertanian disebut juga sebagai usaha agribisnis yaitu rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4(empat) sub sistem , yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolaha dan memasarkan komoditas pertanian; (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain. Dengan demikian maka pembiayaan usaha pertanian merupakan kegiatan penentuan kebutuhan modal, menentukan sumber-sumber permodalan, dan menyalurkannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan usaha pertanian.

Perkreditan merupakan kegiatan penyediaan uang untuk mendanai suatu kegiatan usaha pertanian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah dalam memahami perkreditan adalah unsur-unsur kredit, tujuan pemberian kredit bagi Bank, nasabah dan masyarakat umum, prodesur perkreditan, putusan kredit, peranan kredit pertanian, sistem pembiayaan kredit program, kebijakan kredit pemerintah, keunggulan dan kelemahan : sistem kredit program , bantuan langsung, kredit program bersubsidi. Berdasarkan jenisnya kredit terbagi menjadi kredit program pemerintah, kredit dari lembaga formal, dan kredit dari lembaga non formal. Sumber pembiayaan pertanian dapat diperoleh antara lain dari Kredit Ketahanan

Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Modal Ventura, sistem tunda jual (gabah, komoditas peternakan dan perkebunan), pembiayaan sistim syariah untuk agribisnis, pemanfaatan laba BUMN, dan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK). Dalam menilai kredit analisis yang digunakan adalah 5 C dan 7P. Dalam menghitung tingkat bunga dapat menggunakan metode *flate rate*, *sliding rate*, *floating rate* dan anuitas(*annuity*).

LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan usaha pertanian ;
2. Apa yang dimaksud dengan kredit dan sebutkan tiga hal yang mendasari bahwa kredit merupakan suatu kepercayaan !
3. Jelaskan dengan singkat peranan kredit sebagai pembangunan pertanian
4. Jelaskan dengan singkat keunggulan dan kelemahan dari sistem kredit program, bantuan langsung dan kredit komersial bersubsidi !
5. Sebutkan sumber pembiayaan kredit pertanian yang ada di tempat tugas anda !
6. Apa yang dimaksud dengan analisis 5C dan 7P ?
7. Hitunglah bunga kredit dari kasus pada lampiran 1 melalui diskusi kelompok !

BAB III

PENYUSUNAN PROPOSAL KELAYAKAN USAHA PERTANIAN

1. Pengertian proposal usaha

Proposal usaha merupakan usulan suatu kegiatan usaha sebagai hasil dari studi kelayakan. Studi kelayakan usaha dapat diartikan sebagai suatu pengkajian secara sistematis dari suatu gagasan atau rencana usaha, baik usaha baru maupun pengembangan usaha yang sudah ada, dari berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut. Kajian ini dianggap penting karena kita menyadari bahwa tidak setiap kegiatan usaha selalu sesuai dengan yang diharapkan. Kemungkinan tidak berhasilnya suatu usaha selalu ada, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut.

Tujuan dilakukannya studi kelayakan usaha adalah untuk membantu para pelaku usaha agribisnis, pemilik modal dan pengambil kebijakan (pemerintah) dalam menentukan apakah suatu usaha layak atau tidak untuk dilaksanakan. Dengan studi kelayakan ini para pelaku usaha agribisnis dan pemilik modal mempunyai pegangan serta keyakinan akan segala hal yang berhubungan dengan prospek suatu usaha pada masa yang akan datang dari sejumlah modal yang diinvestasikan.

Studi kelayakan usaha akan dapat menentukan secara akurat jenis-jenis usaha apa saja yang akan dilakukan sehubungan dengan adanya kelangkaan dan keterbatasan dana. Kemudian bagi pemilik modal (Bank, perorangan atau lembaga-lembaga keuangan bukan bank) dapat dijadikan sebagai bahan penilaian apakah rencana usaha yang diajukan memang benar-benar layak untuk dibiayai.

2. Tahapan studi kelayakan usaha

Studi kelayakan merupakan bagian dari suatu perencanaan dengan tahapan sbb :

A. Identifikasi

Identifikasi yaitu penentuan kegiatan usaha yang potensial.

Suatu usaha biasanya diawali dengan ide. Ide usaha yang baik harus didasarkan pada pemikiran yang logis tentang adanya peluang usaha. Tercetusnya ide untuk berusaha dapat timbul dari berbagai sebab, antara lain :

- (1) adanya kecenderungan meningkatnya permintaan terhadap produk atau jasa agribisnis tertentu.
- (2) adanya peluang memanfaatkan teknologi baru.
- (3) adanya keterampilan tertentu, dan

(4) adanya saran / pendapat dari para pakar, dll.

Menurut Husnan dan Suwarsoso (1999) beberapa cara yang dapat dilakukan di dalam identifikasi kesempatan usaha terdiri atas :

- (1) Mempelajari impor
- (2) Menyelidiki materi lokal
- (3) Mempelajari keterampilan tenaga kerja
- (4) Melakukan studi industri
- (5) Menerapkan kemajuan teknologi
- (6) Mempelajari hubungan antar industri
- (7) Menilai rencana pembangunan
- (8) Melakukan pengamatan di tempat lain.

B. Seleksi Pendahuluan

Pada tahap identifikasi akan dihasilkan sejumlah alternatif usaha. Dari sejumlah alternatif usaha yang ada selanjutnya dilakukan penilaian pendahuluan untuk menentukan usaha-usaha mana yang paling mungkin dilakukan. Didalam seleksi pendahuluan harus dipertimbangkan faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat dan pendukung dipilihnya suatu usaha. Dari hasil analisa diatas dapat diketahui alternatif usaha yang memiliki faktor pendukung yang banyak dan faktor penghambat yang paling sedikit. Kemudian diurut berdasarkan faktor pendukung dan penghambatnya, dan dipilihnya sesuai urutan tersebut.

Untuk memperoleh hasil seleksi yang tepat dapat menggunakan analisis KEKEPAN (Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamann) atau SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Strategi yang dapat dihasilkan dari Analysis KEKEPAN (Rangkuti, 1998) terdiri atas

- (1) S-O : strategi memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- (2) S-T : strategi memanfaatkan kekuatan dengan mengatasi ancaman
- (3) W-O : strategi memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
- (4) W-T : strategi meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Langkah-langkah analisis SWOT terdiri atas :

1. Identifikasi faktor-faktor Internal dan faktor Eksternal

2. Menentukan Strategi dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan menggunakan matriks dan skoring.
3. Membuat rekomendasi berdasarkan strategi yang dipilih.

C. Pengkajian atau Studi Kelayakan Usaha

Pada tahap ini, alternatif usaha sudah dipilih berdasarkan analisa pada studi pendahuluan, dinilai secara mendalam terhadap berbagai aspek yang mungkin sangat mempengaruhi. Aspek-aspek yang perlu dianalisis antara lain ; aspek pasar, aspek yuridis, aspek teknis, (produksi)/fisik/pelayanan, aspek pengelolaan (organisasi & manajemen), aspek sosial & lingkungan dan aspek finansial.

Aspek-aspek diatas dikumpulkan datanya dan dianalisis secara cermat. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan menentukan kelayakan usaha yang akan dilaksanakan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan pada tahap ini antara lain :

- (1) jumlah modal dan sumber modal yang diperlukan,
- (2) agroekologi dari komoditas yang akan diusahakan (Budidaya),
- (3) ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas),
- (4) ketersediaan sarana dan prasarana produksi,
- (5) ketersediaan tenaga kerja (tenaga kerja ahli/biasa),
- (6) Prosspek pemasaran.

Berdasarkan penilaian dari seleksi pendahuluan ini akan diperoleh suatu skala prioritas usaha. Alternatif usaha yang paling banyak faktor pendukungnya atau paling sedikit faktor penghambatnya akan menempati prioritas pertama.

D. Penilaian atau Appraisal

Setelah suatu usaha ditelaah melalui kegiatan pengkajian, maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian (appraisal).

Tahap ini akan memberi kesempatan kepada pembuat/penyusun kelayakan usaha untuk meneliti/menilai kembali aspek-aspek yang sudah dianalisis dalam kelayakan usaha, apakah asumsi-asumsi yang digunakan dapat diterima atau tidak. Pada tahap ini benar-benar akan dapat diketahui apakah usaha yang dianalisis layak untuk dilaksanakan atau tidak.

Usaha yang layak untuk dilaksanakan disebut *Go Projet* , dan yang tidak layak untuk dilaksanakan disebut *No Go Project*.

E. Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penyusunan suatu kelayakan usaha. Tahap pelaksanaan merupakan tahap mengimplementasikan segala sesuatu yang telah dirumuskan dan direkomendasikan dalam kelayakan usaha.

Dalam pelaksanaan ini semua yang direkomendasikan harus diimplementasikan secara konsekuen.

F. Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan untuk usaha yang sedang atau sudah dijalankan.

Hasil evaluasi akan menjadi masukan berharga (perbaikan/penyempurnaan) bagi pengusaha, pemilik modal, dan pemerintah di dalam memilih usaha yang sejenis di masa yang akan datang.

Secara umum suatu usaha dikatakan layak apabila :

- (1). Secara teknis dapat dilaksanakan (*technically possible*)
- (2). Secara ekonomis menguntungkan (*economically feasible*)
- (3). Secara social diterima (*socially acceptable*)
- (4). Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (*bankable*)

3. Aspek-aspek kelayakan usaha

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam kelayakan usaha adalah sbb :

a. Aspek Pasar

(1).Perkembangan Pasar

Bagaimana kecendrungan pemasaran produk yang akan dipasarkan selama ini (permintaan, harga, volume penjualan, saluran pemasaran yang ada, dll. Bagian ini memerlukan data statistik atau hasil pengamatan pasar.

(2). Pangsa Pasar

Jelaskan berapa persen prediksi pangsa pasar (*market share*) yang akan menjadi sasaran pemasaran produk tersebut selama periode usaha.

Pasar mana yang dituju (pasar tradisional atau pasar eksklusif, pasar domestik atau lokal; Pasar global)

Jelaskan yang mendasari penetapan pangsa pasar tersebut.

(3). Strategi Pemasaran

Jelaskan strategi pemasaran yang akan dipilih (minimal menggunakan Bauran pemasaran (*Marketing Mix*) 4 P : (1) Produk (*Product*) : bentuk, kemasan, ciri-ciri/sifat-sifat,gaya,mereka dagang,usuran,layanan,jaminan.

(2). Harga (*Price*) : potongan harga,daftar harga,jangka waktu pembayaran, syarat-syarat kredit,penghargaan (allowe). (3). Tempat/distribusi (*Place*) :

lokasi, saluran, liputan, persediaan, dan transportasi, dan (4). Promosi (*Promotion*) : Iklan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, dan publisitas.

b. Aspek Yuridis

(1). Produk

Jelaskan legalitas dari produk yang akan diusahakan berdasarkan ketentuan yang ada dari instansi berwenang (sertifikat halal (halal food), bebas pestisida, bukan tanaman terlarang, dll).

(2). Badan Hukum Perusahaan

Jelaskan badan hukum yang dimiliki (perusahaan perseorangan, Koperasi, CV, dan PT), Untuk kelompok tani misalnya surat pengukuhan kelompok, dll.

(3). Kegiatan Usaha

Jelaskan dokumen yang dimiliki untuk menunjang kelancaran usaha : Hak- pemilikan tanah (Hak Milik, HGB, Hak pakai), izin usaha (HO, SIUP, IMB, IPB, Asosiasi, Gapoktan, dll)

*c. Aspek Teknis (Produksi) / Fisik / Pelayanan ***

(1). Keadaan lokasi usaha

Jelaskan keadaan fisik lokasi usaha (untuk usahatani misalnya agroekologi, Kedekatan dengan jalan, pasar, dll)

(2). Proses Produksi

Jelaskan bagaimana proses produksi secara sistematis mulai tahap awal sampai akhir kegiatan produksi.

Jelaskan teknologi produksi yang digunakan (tradisional /semi modrn/modern). Untuk usahatani : monokultur atau polikultur, dll.

Jelaskan taksiran-taksiran kebutuhan input fisik yang diperlukan (misalnya tanah, bangunan, peralatan, bahan baku/sarana produksi, dll), dan bagaimana cara memperoleh kebutuhan input tersebut.

Sajikan tabel-tabel taksiran kebutuhan input tersebut.

Jelaskan taksiran produk akhir yang akan diperoleh dari seluruh proses tersebut.

d. Aspek Pengelolaan

(1). Pola pengelolaan usaha

Jelaskan siapa manajer/pimpinan usaha ini, siapa pelaksana, siapa pengawas/mandor, dan bagaimana mekanisme kerja serta pengawasannya.

(2). Struktur Organisasi

Jelaskan struktur organisasi dan pembagian kerja sebagai konsekuensi dari seluruh tahapan kegiatan usaha yang akan dilakukan. Lengkapi dengan gambar struktur organisasinya.

(3) Kebutuhan Tenaga Kerja

Berdasarkan struktur organisasi tersebut pada 5.2 jelaskan jumlah tenaga kerja serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk menempati posisi yang ada.

e. Aspek Sosial dan lingkungan

(1).Dampak terhadap masyarakat

Jelaskan manfaat adanya kegiatan usaha bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah (retribusi dan pajak), penerimaan/ penghematan devisa.

Jelaskan *backward linkage* dan *forward linkage* dari kegiatan usaha tersebut.

(2).Dampak terhadap lingkungan

Jelaskan dampak positif dari kegiatan usaha tersebut terhadap lingkungan, peluang timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan, dan rencana pencegahan serta penanggulangannya dari dampak negatif yang mungkin timbul.

f. Aspek Finansial

(1). Kebutuhan biaya investasi

Berdasarkan seluruh proses kegiatan usaha, jelaskan biaya investasi yang diperlukan, dan bagaimana cara menaksir kebutuhan biaya investasi tersebut.

Sajikan hasil perhitungannya,

(2). Kebutuhan modal kerja

Berdasarkan seluruh proses kegiatan usaha, jelaskan modal kerja yang diperlukan, dan bagaimana cara menaksir kebutuhan modal tersebut

Sajikan hasil perhitungannya.

(3).Sumber pendanaan

Jelaskan bagaimana cara membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja tersebut (sumber dan cara memperoleh dana tersebut)

(4). Pelunasan kredit (bagi yang menggunakan dana kredit)

Jelaskan bagaimana prosedur dan tahapan pelunasan kredit yang menjadi kewajiban usaha yang bersangkutan. Jelaskan kapan kredit tersebut dapat dilunasi. Sajikan hasil perhitungannya.

(5). Analisis kelayakan finansial

Buatlah beberapa analisis kelayakan finansial dari rencana kegiatan usaha tersebut.

Jelaskan dasar-dasar perhitungan yang digunakan dan hasil analisisnya.

Beberapa analisis yang dapat digunakan :

(1). Analisis yang tidak dapat memperhitungkan faktor waktu atas nilai uang.

Anggaran arus kas (*Cash Flow budget*), Proyeksi laba rugi, Revenue-Cost Ratio (R/C), Titik Pulang Pokok (*Break Even Point/BEP*), Periode pengembalian usaha (*Paybac period*).

(2). Analisis yang memperhitungkan faktor waktu atas nilai uang.

Kelayakan investasi : *Net Present Value* (NPV), *Benefit – Cost ratio* (B/C), *Internal Rate of Return* (IRR).

(3). Analisa Kepekaan (*Sensitivity analysis*)

→ Proyeksi anggaran kas dan laba rugi dibuat untuk suatu periode tertentu (misalnya : 5 tahun, 10 tahun, atau lebih dari 10 tahun).

4. Analisis finansial

(1). Analisis yang tidak memperhatikan nilai uang karena factor waktu

Analisis yang dapat digunakan adalah *Revenue/Cost*(R/C), *Break even Point* (BEP) dan Periode pengembalian (*Payback periods*).

Suatu usaha dikatakan layak untuk dilaksanakan apabila :

- R/C lebih dari satu.

R/C merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya yang tidak dikalikan dengan faktor diskon tertentu

- BEP lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan (*Revenue*)

BEP merupakan titik dimana usaha yang kita laksanakan tidak mengalami kerugian dan tidak memperoleh keuntungan.

- Periode pengembalikannya(*Payback period*) lebih pendek dibandingkan dengan umur Proyek yang direncanakan. *Payback period* merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk memperoleh kembali semua modal yang telah diinvestasikan.

(2). Analisis yang memperhatikan nilai uang karena factor waktu

Analisis yang dapat digunakan adalah *Net Present Value* (NPV) , *Benefit/Cost* (B/C) , dan *Internal Rate of Return* (IRR).

Suatu usaha dikatakan layak untuk dilaksanakan apabila :

- NPV positif.

NPV merupakan perbedaan antara nilai keuntungan dan biaya pada saat ini. Nilai NPV lebih besar nol (positif) dapat diterima, namun jika lebih kecil dari nol harus ditolak.

- B/C lebih dari satu.

B/C merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya yang telah dikalikan dengan faktor diskon tertentu.

- IRR lebih besar dibandingkan dengan suku bunga bank.

IRR merupakan tingkat diskon yang menyamai nilai dan keuntungan dan biaya saat ini. Jika IRR lebih besar dari biaya pinjaman atau biaya modal maka usaha dapat diterima(layak).

(2). Analisis kepekaan (*Sensitivity Analysis*)

Analisis ini mencoba untuk melihat sejauh mana perubahan yang terjadi apabila ada satu atau lebih variabel mengalami perubahan,

Analisis Finansial Usaha Pembuatan Tepung "X"

1. Kebutuhan Modal

a. Modal Tetap/Investasi

(dalam ribuan rupiah)

No.	Komponen	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mesin	1 Set	10.000	10.000
2.	Bangunan	1 Unit	20.000	20.000
3.	Tanah	2000 m ²	10	20.000
4.	Biaya Perizinan, dll	1 Paket	4.000	4.000
				54.000

b. Modal Kerja per-bulan *)

(dalam ribuan rupiah)

No.	Komponen biaya	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bahan baku	16 ton	250	4.000
2.	Bahan bakar	250 liter	0,6	150
3.	Pelumas	1 Galon	50	50
4.	Gaji & Upah	5 orang	250	1.250
5.	Pemeliharaan, dll	-	-	550
				6.000

2. Sumber Pendanaan

No.	Komponen	Sumber modal (Rp)		Total (Rp)
		Sendiri	Pinjaman	
1.	Modal Investasi	30.000	24.000	54.000
2.	Modal Kerja	-	6.000	6.000
Jumlah (Rp)		30.000	30.000	60.000
Proporsi (%)		50	50	100

3. Pelunasan Pinjaman

Jadwal Pengembalian Pinjaman kepada Bank "X" oleh UPT "X" *)

Th Ke	Saldo Awal (Rp)	Cicilan (Rp)			Saldo Akhir (Rp)
		Pokok	Bunga	Total	
1.	30.000	6.000	6.000	12.000	24.000
2.	24.000	6.000	6.000	12.000	18.000
3.	18.000	6.000	6.000	12.000	12.000
4.	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000
5.	6.000	6.000	6.000	12.000	0
Jumlah (Rp)		30.000	30.000	60.000	-

*) Bunga ditetapkan Flate rate

4. Proyeksi penerimaan (Revenue) dan Biaya(cost)

a. Penjualan Tepung "X" per-tahun

= 16.000 kg x 40 % (rendemen) x Rp. 1,25 x 12 bln = Rp. 96.000

b. Biaya per-tahun :

No.	Komponen	Keterangan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Tetap			
	- Gaji	1 or, 12 bln	500	6.000
	- Penyusutan			
	❖ Mesin	Jue 5 thn	2.000	2.000
	❖ Bangunan	Jue 5 thn	4.000	4.000
	- Amortisasi	Jue 5 thn	800	800
- Bunga Pinjaman	Th, 5 thn	6.000	6.000	
Jumlah (1)				18.000
2.	Biaya Variabel			
	- Bahan Baku	16 ton, 12 bl	200	38.000
	- Bahan Bakar	10 lt, 25 hr, 12 bl	0,6	1.800
	- Pelumas	1 gl, 12 bl	50	600
	- Upah	5 org, 12 bl	-	9.000
	- Pemeliharaan, dll	12 bl	550	6.600
Jumlah (2)				56.400
3.	Biaya Total (1+2) Rp.			75.200

5. Proyeksi Laba rugi per tahun (pada tahun ke-1)

(1). Penerimaan		Rp. 96.000
(2). Biaya (Cost)		
a. Biaya Tetap	Rp. 18.800	
b. Biaya Variabel	Rp. 56.400	
Jumlah biaya 2 = (2a + 2b)		Rp. 75.200
3. Laba sebelum Pajak (1-2)		Rp. 20.800
4. R/C		1,27
6. Periode Pengembalian (Payback Period)		

Th. Ke	Investasi	Kas masuk Operasional Bersih *)	Sisa Investasi	Periode	
				Tahun	Bulan
0.	54.000			1	-
1.	-	27.600	26.400	-	11,5
2.	-	27.600	(1.200)		
3.	-	27.600			
4.	-	27.600			
5.	-	27.600			

*) Laba sebelum pajak + Penyusutan + Amortisasi

7. Break Even Point (BEP)

$$\begin{aligned}
 \text{a. BEP (dalam Rp)} &= \text{Biaya Tetap} : 1 - \frac{\text{Biaya Variabel}}{\text{Penjualan}} \\
 &= 18.800 : 1 - \frac{56.400}{96.000} \\
 &= \mathbf{Rp. 45.576 \text{ per tahun}}
 \end{aligned}$$

$$\text{b. BEP (dalam kg)} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Harga Satuan} - \frac{\text{Biaya variabel} \times \text{Harga Satuan}}{\text{Penjualan}}}$$

$$= \frac{18.800}{1,25 - (56.400 \times 1,25)}$$

$$= \frac{18.800}{96.000}$$

$$= 36.461 \text{ kg per tahun}$$

8. Proyek Arus Kas (Cash Flow) UPT "X" selama 5 tahun

No.	Uraian	Tahun ke (Rp)				
		1	2	3	4	5
1.	Arus Kas Masuk (Cash Inflow)					
	- Modal Sendiri	30.000	-	-	-	-
	- Modal Pinjaman	30.000	-	-	-	-
	- Penjualan	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	- Penyusutan	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Amortisasi	800	800	800	800	800
	Jumlah (1)	162.800	102.800	102.800	102.800	102.800
2.	Arus Kas Keluar (Cash Outflow)					
	- Pembelian Mesin	10.000	-	-	-	-
	- Pend Bangunan	20.000	-	-	-	-
	- Pembelian Tanah	20.000	-	-	-	-
	- Biaya Perizinan	4.000	-	-	-	-
	- Biaya Tetap :					
	❖ Gaji	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	❖ Cicilan Pokok	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	❖ Cicilan Bunga	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Biaya variabel :					
	❖ Bahan Baku	38.000	38.400	38.400	38.400	38.400
	❖ Bahan Bakar	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	❖ Pelumas	600	600	600	600	600
	❖ Upah	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	❖ Pemeliharaan, dll.	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Jumlah (2)	128.400	74.400	74.400	74.400	74.400
3.	Arus Kas Bersih (Net Cash Flow) (1-2)	34.400	28.400	28.400	28.400	28.400
4.	Kas Awal	0	34.400	62.800	91.200	119.600
5.	Kas Akhir (3+4)	34.400	62.800	91.200	119.600	148.000

9. Analisis NPV , B/C, dan IRR (Analisis tersaji pada Tabel 9).

a. NPV (pada DR 20 %) = Rp. 8.192

b. B/C (pada DR 20 %) :

$$(1). \text{Gross B/C} = 286.540 : 277.847,9 = 1,03$$

$$(2). \text{Net B/C} = 62.194 : 54.000 = 1,15$$

$$\begin{aligned} \text{c. IRR} &= i_1 + \left\{ \frac{\text{NPV}_{i_1}}{\text{NPV}_{i_1} - \text{NPV}_{i_2}} \right\} \times (i_2 - i_1) \\ &= 20 + \left\{ \frac{8.192}{100.192 + 3.352} \right\} \times (30 - 20) \\ &= 20 + 7,22 = 27,22 \% \end{aligned}$$

10. Analisis Kepekaan (Sensitivity Analysis)

No.	Komponen	(1)	(2)
1.	Produk / th (kg)	76.800	76.800
2.	Harga jual /kg (Rp)	1,25	1,5 *)
3.	Penjualan /th (Rp) **)	96.000	115.200
4.	Biaya Tetap /th (Rp)	18.800	18.800
5.	Biaya Variabel /th (Rp)	56.400	56.400
6.	Laba /th (Rp)	20.800	40.000
7.	BEP pertahun : (Rp)	45.576	36.863
	(Kg)	36.461	25.405
8.	R/C	1,27	1,53
9.	B/C pada 20 % : Gross B/C	1,03	1,20
	Net B/C	1,15	2,16
10.	NPV pada 20 % (Rp)	8.192	62.640
11.	IRR (%)	27.22	72

*) Variabel yang berubah

***) dihitung dalam ribuan rupiah

Kesimpulan :

Rencana usaha tepung "X" layak untuk dilaksanakan karena :

1. R/C lebih dari satu, yaitu 1,27.
2. Payback Period lebih pendek(1 tahun, 1,5 bulan) dibandingkan dengan umur proyek yang ditetapkan (5 tahun)
3. BEP lebih kecil (Rp 45.576.000 atau 36.461 Kg) dibandingkan dengan Penerimaan (Rp 96.000.000 atau 76.800 Kg).
4. NPV positif Rp 8.192.000,-
5. B/C : Gross B/C =1,03 dan Net B/C = 1,15
6. IRR (27,22 %) lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga Bank yang ditetapkan (20 %).

RANGKUMAN

Proposal usaha merupakan usulan suatu kegiatan usaha sebagai hasil dari studi kelayakan. Studi kelayakan usaha dapat diartikan sebagai suatu pengkajian secara sistematis dari suatu gagasan atau rencana usaha, baik usaha baru maupun pengembangan usaha yang sudah ada, dari berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut. Kajian ini dianggap penting karena kita menyadari bahwa tidak setiap kegiatan usaha selalu sesuai dengan yang diharapkan. Kemungkinan tidak berhasilnya suatu usaha selalu ada, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut.

Tujuan dilakukannya studi kelayakan usaha adalah untuk membantu para pelaku usaha agribisnis, pemilik modal dan pengambil kebijakan (pemerintah) dalam menentukan apakah suatu usaha layak atau tidak untuk dilaksanakan. Dengan studi kelayakan ini para pelaku usaha agribisnis dan pemilik modal mempunyai pegangan serta keyakinan akan segala hal yang berhubungan dengan prospek suatu usaha pada masa yang akan datang dari sejumlah modal yang diinvestasikan. Tahapan studi kelayakan usaha terdiri atas identifikasi, seleksi pendahuluan, pengkajian atau studi kelayakan usaha, penilaian atau appraisal, pelaksanaan, dan evaluasi. Secara umum suatu usaha dikatakan layak apabila secara teknis dapat dilaksanakan, secara ekonomis menguntungkan, secara sosial dapat diterima dan memenuhi persyaratan yang diterapkan perbankan.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun studi kelayakan usaha terdiri atas aspek : pasar, yuridis, pengelolaan, sosial dan lingkungan dan finansial.

Analisis finansial terdiri atas analisis yang tidak memperhatikan nilai uang karena faktor waktu seperti : R/C, BEP dan Payback period dan analisis yang memperhatikan nilai uang karena faktor waktu seperti : NPV, B/C dan IRR.

LATIHAN

1. Apa yang dimaksud proposal usaha dan studi kelayakan usaha ?
2. Apa tujuan dibuatnya suatu studi kelayakan usaha ?
3. Jelaskan dengan singkat tahapan studi kelayakan usaha !
4. Variabel apa saja yang harus diperhatikan dalam menganalisis aspek pasar ?
5. Apa kriteria suatu usaha dikatakan layak dilihat dari R/C, BEP dan Payback period ?
6. Apa tujuan dilaksanakannya analisis kepekaan dalam suatu studi kelayakan usaha ?
7. Lakukan analisis untuk menentukan kelayakan usaha dilihat dari segi finansial seperti pada lampiran 2 atau menyusun kelayakan usaha dari suatu agribisnis seperti pada lampiran 3. Diskusikan secara berkelompok !

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M, TB. Nur. 1998. Studi Kelayakan Usaha, Kerjasama IPB-Deptan dan Depkop PKM.
- Gitinger, J.P. 1996. Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian, UI-Press, Jakarta.
- Husnan, Suad dan Suwarsono. 1999. Studi Kelayakan Proyek (Edisi 3) UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Kadarsan, Halimah W. 1992. Keuangan Pertanian dan Pembiayaan , Perusahaan Agribisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kadariah, 1988. Evaluasi Proyek (Analisis Ekonomis), Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Musyadar, dkk. 2004. Studi Kelayakan Usaha. Universitas Terbuka ,Jakarta.
- Nuraeni,dkk. 2005. Manajemen Agribisnis, STPP Bogor.
- Rangkuti, Freddy. 1998. Analisis SWOT Teknik membedah kasus bisnis (Rekomendasi Konsep Strategi untuk menghadapi abad 21), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta..
- Umar, Husein. 2003. Studi Kelayakan Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
-, 1991. Penyusunan Studi Kelayakan Usaha bagi KUD Mandiri, Kerjasama Departemen Koperasi RI dan Lembaga Demografi UI Jakarta.
- 2003. Laporan akhir : Analisis Rekayasa Kelembagaan Pembiayaan Usaha Pertanian. Puslitbang Sosek.
-2007. Kelayakan Usaha Komoditas Unggulan. Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian
-, 2009. Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian. Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.
-, 2009. Pedoman Teknis Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian

Lampiran 1.

Kasus 1.

Kelompok tani Sejahtera merencanakan akan membeli traktor tangan sebanyak satu unit dengan harga Rp 50.000.000,-. Untuk membiayai pengadaan traktor tersebut kelompok berencana meminjam dari Bank BRI di Kecamatan X. Bank BRI setuju untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dan menetapkan tingkat suku bunga 10 % per tahun dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun. Agar kelompok memperoleh fasilitas bunga yang lebih murah coba anda hitung besarnya bunga pinjaman untuk selama 5 tahun dengan menggunakan metode Flate rate, Sliding rate dan Anuitas dengan Capital Recovery Factor (CRF) !

4. Metode Flate rate

Tabel 1. Contoh Perhitungan Flate rate (dalam ribuan)

Th ke	Saldo Awal (Rp)	Cicilan (Rp)			Saldo Akhir (Rp.)
		Pokok	Bunga	Total	
1.					
2.					
3.					
4.					
5..					
Jumlah (Rp)					-

5. Metode Sliding rate

Tabel 2. Contoh Perhitungan Sliding rate (dalam ribuan)

Th ke	Saldo Awal (Rp)	Cicilan (Rp)			Saldo Akhir (Rp.)
		Pokok	Bunga	Total	
1.					
2.					
3.					
4.					
5..					
Jumlah (Rp)					-

6. Metode Anuitas dengan Capital Recovery Factor (CRF)

Tabel 3. Contoh Perhitungan Anuitas dengan Capital Recovery Factor (dalam ribuan)

Uraian	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Total (Rp)
1. Pinjaman						
2. Cicilan Pokok (4-3)						
3. Cicilan Bunga (%Bx1)						
4. Anuitas						
5. Sisa Pinjaman (1-2)						

Lampiran 2.

Suatu usaha penggilingan padi milik Gapoktan Lestari merencanakan untuk mengembangkan usahanya dengan memperbesar kapasitas giling. Pengembangan usaha ini didasarkan atas pertimbangan karena adanya peningkatan permintaan jasa penggilingan beras dari para petani setempat.

Untuk mendukung rencana tersebut Gapoktan merencanakan untuk menyediakan modal investasi sebesar Rp 50.000.000,-. Adapun mengenai biaya operasional dan penerimaan tahunannya untuk selama 5(lima) tahun diproyeksikan sbb :

Th ke	Biaya operasional (Rp)	Penerimaan(Revenue) (Rp)
1	60.000.000	80.000.000
2	50.000.000	80.000.000
3	40.000.000	70.000.000
4	30.000.000	40.000.000
5	30.000.000	40.000.000

Tugas :

- a. Berdasarkan data yang ada coba anda analisis rencana pengembangan usaha tersebut dengan melihat *Net Present Value*(NPV), *Benefit/Cost* (B/C) dan *Internal Rate of Return* (IRR). Tingkat diskon (*discount rate*) mengacu kepada tingkat suku bunga bank yang berlaku yaitu 16 %.

Gunakan tabel analisis pada lampiran 2 !

- b. Berikan kesimpulannya ! Apakah usaha tersebut layak (*Go project*) atau tidak layak (*No go project*) ?.

Lampiran 3.
Format studi kelayakan usaha

Kelayakan Usaha

Jenis Usaha : Pendirian /Pengembangan..... *)
 Desa/ Kelurahan :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten/ Kota :.....
 Provinsi :.....

I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Uraikan secara singkat alasan pemilihan jenis usaha tersebut dilihat dari potensi wilayah, pangsa pasar, kebijakan pemerintah, dan alasan lain yang menunjang. Jelaskan manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan usaha tersebut bagi pengusaha (individu, kelompok usaha), masyarakat, dan pemerintah.

II. Aspek Pasar

2.1. Perkembangan Pasar

Bagaimana kecenderungan pemasaran produk yang akan dipasarkan selama ini (permintaan, harga, volume penjualan, saluran pemasaran yang ada, dll. Bagian ini memerlukan data statistik atau hasil pengamatan pasar.

2.2. Pangsa Pasar

Jelaskan berapa persen prediksi pangsa pasar (*market share*) yang akan menjadi sasaran pemasaran produk tersebut selama periode usaha.

Pasar mana yang dituju (pasar tradisional atau pasar eksklusif, pasar domestik atau lokal; Pasar global)

Jelaskan yang mendasari penetapan pangsa pasar tersebut.

2.3. Strategi Pemasaran

Jelaskan strategi pemasaran yang akan dipilih (minimal menggunakan Bauran pemasaran (Marketing Mix) 4 P : (1) Produk (Product) : bentuk, kemasan, ciri-ciri/sifat-sifat, gaya, merek dagang, usuran, layanan, jaminan. (2). Harga (Price) : potongan harga, daftar harga, jangka waktu pembayaran, syarat-syarat penjualan kredit, penghargaan (allowance). (3). Tempat/distribusi (Place) : lokasi, saluran, liputan, preceding, dan transportasi, dan (4). Promosi (Promotion) : Iklan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, dan publisitas.

III. Aspek Yuridis

3.1. Produk

Jelaskan legalitas dari produk yang akan diusahakan berdasarkan ketentuan yang ada dari instansi berwenang (sertifikat halal (halal food), bebas pestisida, bukan tanaman terlarang, dll).

3.2. Badan Hukum Perusahaan

Jelaskan badan hukum yang dimiliki (preusan perseorangan, Koperasi, CV, dan PT), Untuk kelompok tani misalnya surat pengukuhan kelompok, dll.

3.3. Kegiatan Usaha

Jelaskan dokumen yang dimiliki untuk menunjang kelancaran usaha : Hak-pemilikan tanah (Hak Malik, HGB, Hak pakai), izin usaha (HO, SIUP, IMB,IPB,Asosiasi,Gapoktan,dll)

IV. Aspek Teknis (Produksi) / Fisik / Pelayanan **

4.1. Keadaan lokasi usaha

Jelaskan keadaan fisik lokasi usaha (untuk usahatani misalnya agroekologi, Kedekatan dengan jalan, pasar,dll)

4.2. Proses Produksi

Jelaskan bagaimana proses produksi secara sistematis mulai tahap awal sampai akhir kegiatan produksi.

Jelaskan teknologi produksi yang digunakan (tradisional /semi modrn/ modern). Untuk usahatani : monokultur atau polikultur, dll.

Jelaskan taksiran-taksiran kebutuhan input fisik yang diperlukan (misalnya tanah,bangunan, peralatan, bahan baku/sarana produksi,dll), dan bagaimana cara memperoleh kebutuhan input tersebut.

Sajikan tabel-tabel taksiran kebutuhan input tersebut.

Jelaskan taksiran produk akhir yang akan diperoleh dari seluruh proses tersebut.

V. Aspek Pengelolaan

5.1. Pola pengelolaan usaha

Jelaskan siapa manajer/pimpinan usaha ini, siapa pelaksana, siapa pengawas/mandor, dan bagaimana mekanisme kerja serta pengawasannya.

5.2. Struktur Organisasi

Jelaskan struktur organisasi dan pembagian kerja sebagai konsekuensi dari seluruh tahapan kegiatan usaha yang akan dilakukan. Lengkapi dengan gambar struktur organisasinya.

5.3. Kebutuhan Tenaga Kerja

Berdasarkan struktur organisasi tersebut pada 5.2 jelaskan jumlah tenaga kerja serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk menempati posisi yang ada.

VI. Aspek Sosial dan lingkungan

6.1. Dampak terhadap masyarakat

Jelaskan manfaat adanya kegiatan usaha bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah (retribusi dan pajak), penerimaan/ penghematan devisa.

Jelaskan backward linkage dan forward linkage dari kegiatan usaha tersebut.

6.2. Dampak terhadap lingkungan

Jelaskan dampak positif dari kegiatan usaha tersebut terhadap lingkungan, peluang timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan, dan rencana pencegahan serta penanggulangannya dari dampak negatif yang mungkin timbul.

VII. Aspek Finansial

7.1. Kebutuhan biaya investasi

Berdasarkan seluruh proses kegiatan usaha, jelaskan biaya investasi yang diperlukan, dan bagaimana cara menaksir kebutuhan biaya investasi tersebut. Sajikan hasil perhitungannya,

7.2. Kebutuhan modal kerja

Berdasarkan seluruh proses kegiatan usaha, jelaskan modal kerja yang diperlukan, dan bagaimana cara menaksir kebutuhan modal tersebut. Sajikan hasil perhitungannya.

7.3. Sumber pendanaan

Jelaskan bagaimana cara membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja tersebut (sumber dan cara memperoleh dana tersebut)

7.4. Pelunasan kredit (bagi yang menggunakan dana kredit)

Jelaskan bagaimana prosedur dan tahapan pelunasan kredit yang menjadi kewajiban usaha yang bersangkutan. Jelaskan kapan kredit tersebut dapat dilunasi. Sajikan hasil perhitungannya.

7.5. Analisis kelayakan finansial

Buatlah beberapa analisis kelayakan finansial dari rencana kegiatan usaha tersebut. Jelaskan dasar-dasar perhitungan yang digunakan dan hasil analisisnya.

Beberapa analisis yang dapat digunakan :

- (1). Analisis yang tidak dapat memperhitungkan faktor waktu atas nilai uang. Anggaran arus kas (Cash Flow budget), Proyeksi laba rugi, Revenue-Cost Ratio (R/C), Titik Pulang Pokok (Break Even Point/BEP), Periode pengembalian usaha (Paybac period).
- (2). Analisis yang memperhitungkan faktor waktu atas nilai uang. Kelayakan investasi : Net Present Value (NPV), Benefit – Cost ratio (B/C), Internal Rate of Return (IRR).
- (3). Analisa Kepekaan (Sensitivity analysis)
→ Proyeksi anggaran kas dan laba rugi dibuat untuk suatu periode tertentu (misalnya : 5 tahun, 10 tahun, atau lebih dari 10 tahun).

VIII. Kepustakaan

- *) Pendirian usaha baru / pengembangan usaha yang ada .
- **) Teknis : usaha produksi , kegiatannya proses produksi.
- Fisik : usaha perdagangan, kegiatan proses fisik
- Pelayanan : usaha jasa kegiatannya proses pelayanan